



PENGADAAN LAHAN RTHP DI MANTRIJERON TERTUNDA Tidak Ada Titik Temu Soal Harga

YOGYA (KR) - Kebijakan Pemkot Yogya untuk memperbanyak Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) tidak selamanya berjalan mulus. Tahun ini, rencana pengadaan lahan RTHP di Kelurahan Mantrijeron terpaksa ditunda lantaran tidak ada titik temu terkait kesepakatan harga.

Menurut Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogya Hari Setyawacana, tahun ini ada empat kegiatan pengadaan lahan khusus untuk RTHP. Masing-masing di Mantrijeron, Mujamuju, Karangwaru dan Purbayan.

"Kalau yang di Mantrijeron terpaksa tidak dilanjutkan. Sedangkan di tiga lokasi lain sudah bisa direalisasikan dan sedang dalam proses sertifikasi," tandasnya, Jumat (27/7).

Menurutnya, rencana pengadaan tanah di Mantrijeron sebenarnya berasal dari usulan warga. Namun di tengah perjalanan terjadi perubahan terhadap nilai harga pembelian tanah sehingga pengadaan tanah tidak bisa dilak-

sanakan. Oleh karena itu Pemkot Yogya akan mencoba mengalihkan pengadaan tanah ke lokasi lain yang masih memungkinkan melalui anggaran perubahan.

Seluruh pengadaan lahan untuk RTHP memang harus berasal dari usulan warga. Sampai saat ini sudah banyak proposal dari warga yang masuk, dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang akan melakukan kajian dan penetapan prioritas. Total alokasi pengadaan lahan itu pada APBD 2018 mencapai Rp 4 miliar. "Saat pembahasan anggaran perubahan, kami akan usulkan sebanyak-banyaknya kegiatan pengadaan tanah untuk RTHP. Mudah-mudahan bisa disepakati oleh legislatif," ujarnya.

Hari mengatakan, lahan yang akan

dibeli memiliki luas beragam, mulai dari 300 meter persegi hingga 800 meter persegi. Seluruhnya adalah lahan terbuka tanpa ada bangunan yang berdiri di atasnya. Pengadaan lahan untuk disulap menjadi ruang terbuka hijau publik ini rutin dilakukan sejak tahun 2015. Pada tahun 2017 lalu Pemkot melakukan pembelian lahan di tiga lokasi yaitu Pringgokusuman dengan luas 225 meter persegi, Purwokinanti seluas 276 meter persegi, dan Kricak sekitar 1.100 meter persegi.

Selain pengadaan lahan untuk keperluan RTHP, pihaknya juga memilih proyek serupa untuk pemindahan kantor Kelurahan Suryatmajan. Namun demikian, rencana itu juga belum bisa dilakukan lantaran terkendala tanah yang akan dibeli belum turun waris. "Akibatnya, tata kala pengadaannya pun mundur. Kami tidak akan membeli tanah yang statusnya belum jelas. Harapannya, pengadaan tetap bisa di alisasikan tahun ini," katanya. (Dhi)-

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005